

ORIENTASI KEPEMIMPINAN KIAI DAN PENDIDIKAN PESANTREN DI ERA MODERNISASI

¹Izzat Amini,

zataastaa@gmail.com

²Yusfar Ramadhan

yusfar0106@gmail.com

ABSTRACT

As a place of transmission of Islamic knowledge, pesantren are affected by the globalization. There are at least two attitudes taken by pesantren in the face of globalization; reject the principle of globalization, and accommodate and selectively for the essence of globalization while maintaining the principles of Islamic values. They are many steps must be taken immediately through by pesantren: improving the quality of the Kiai's leadership orientation and the orientation of the quality of Islamic boarding school education in the face of globalization. This research is a library research. The purpose of this study was to determine the leadership orientation of the kiai in the era of globalization and how the idealization of the orientation of pesantren education in the globalization. The results of this study is: First, Kiai's leadership orientation is based on: (1) orientation to produce the thought (2) orientation to creating relationships, and (3) orientation to the formation of work quality. Second, the orientation of pesantren education is based on: First, increasing institutional orientation through improving the quality of education and learning. Second, increasing the competence of the pesantren community and the life skills of graduates.

Keywords: Orientation, Leadership, Education, Pesantren

¹ Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

² Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

ABSTRAK

Sebagai tempat transmisi keilmuan Islam, pesantren sebagai lembaga pendidikan terkena dampak dari arus kuat globalisasi. Terdapat dua sikap dan respon yang diambil oleh pesantren dalam menghadapi arus tersebut; menolak secara tegas prinsip globalisasi, dan kedua, melakukan akomodasi secara gradual dan selektif terhadap esensi globalisasi dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar kepesantrenan dan nilai keislaman. Langkah konstruktif harus segera dilakukan melalui: peningkatan kualitas orientasi kepemimpinan Kiai serta orientasi mutu pendidikan pesantren dalam menghadapi globalisasi. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*library research*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui orientasi kepemimpinan kiai di era globalisasi dan bagaimana bentuk idealisasi orientasi pendidikan pesantren di era globalisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*, orientasi kepemimpinan Kiai berlandaskan kepada: (1) orientasi untuk menghasilkan produk pemikiran (2) orientasi untuk menciptakan hubungan, dan (3) orientasi pembentukan kualitas kerja. *Kedua*, orientasi pendidikan pesantren berdasarkan kepada: *Pertama*, peningkatan orientasi kelembagaan melalui peningkatan kualitas mutu pendidikan dan pembelajaran. *Kedua*, peningkatan kompetensi masyarakat pesantren dan *life skill* lulusan.

Kata Kunci: Orientasi, Kepemimpinan, Pendidikan, Pesantren

PENDAHULUAN

Kiai memiliki fungsi sebagai pemimpin masyarakat yang bersifat polimorfik, berpengaruh penting dalam pelbagai bidang. Kiai dipandang memiliki kendali legitimasi dan otoritas kharismatis, sehingga nasihat dan keputusan mereka cenderung disepakati dan ditaati oleh masyarakat secara luas.³ Keberadaan Kiai dianggap bisa memberikan santapan rohani, mengisi kekosongan dan kegalauan hati mereka.⁴ Alasan tersebutlah yang menjadikan pesantren tetap *survive* dan menjadi pendidikan alternatif bagi masyarakat. Mardiyah menegaskan bahwa eksistensi pendidikan pesantren disebabkan oleh berhasilnya seorang kiai sebagai pimpinan dalam menciptakan karakter para santri yang berhasil membuktikan kualitas pengabdian pada umat, bangsa, dan negara,⁵ melalui metodologi kaderisasi yang baik dan sistematis dalam mencetak *output* yang unggul dan berkualitas.

Disebabkan kapabilitas yang dimiliki Kiai, tidak mengherankan apabila ekspektasi masyarakat terhadap pesantren sangat tinggi. Hal tersebut diasumsikan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan khas Indonesia, tidak hanya berorientasi untuk mewujudkan dan mengembangkan sistem pendidikan yang

³ Mohammad Tidjani Djauhari, *Membangun Madura* (Jakarta: Taj Publishing, 2008), hal. 14

⁴ Zainal Arifin Thoha, *Runtuhnya Singgasana Kiai* (Yogyakarta: KUTUB, 2003) hal. 16

⁵ Mardiyah, *Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi* (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2012) hal. 19

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia saja. Akan tetapi, pesantren memiliki orientasi untuk membawa Islam kembali kepada abad kejayaan masa lalu.

Namun demikian, dengan merujuk kepada kondisi riil pesantren saat ini, tampaknya *statement* di atas sulit untuk dilakukan, mengingat pesantren saat ini berada pada masa-masa krisis kepercayaan diri. Terbukti, di tengah kepanikan dalam menghadapi kuatnya pengaruh arus utama tersebut. Untuk sekedar mempertahankan eksistensi lembaga ataupun meningkatkan jumlah santri, pesantren mengakomodasi pola dan sistem pendidikan sekuler. Qomar menegaskan bahwa hal tersebut disebabkan motif ekonomis.⁶ Tidak dipungkiri, cara tersebut menjadikan pesantren hidup di bawah dominasi budaya pragmatisme. Praktik pragmatisme yang merupakan habitus dari ekonomi telah merasuk ke jantung yang paling dalam di dunia pendidikan, termasuk pesantren.⁷

Maka demikian, pesantren yang diharapkan menjadi perisai terakhir untuk bisa membangkitkan mental dan kepercayaan diri umat muslim serta menjadi model percontohan bagi lembaga pendidikan islam, kini disibukkan dengan problematika dan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi, baik internal ataupun eksternal.

⁶ Mujamil Qomar, *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Emir, 2015), 134.

⁷ Mukhrizal Arif, dkk, *Pendidikan Posmodernisme; Telaah Kritis Pemikiran Tokoh Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),

Dalam konteks internal, Madjid menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan kurangnya kemampuan pesantren mengikuti dan menguasai perkembangan zaman terletak pada lemahnya visi dan tujuan yang ditetapkan oleh pesantren.⁸ Ia melihat ketidakjelasan arah, ataupun sasaran yang ingin dicapai pesantren, sehingga tidak mengherankan apabila pesantren hanya melahirkan produk-produk pesantren yang dianggap kurang siap “lebur” untuk mewarnai kehidupan modern. Atau dengan kata lain, pesantren hanya memunculkan santri-santri dengan kemampuan-kemampuan yang terbatas.⁹

Senada dengan pandangan Majid di atas, Qomar menambahkan bahwa pesantren tidak memiliki formulasi tujuan yang jelas, baik dalam tataran institusional, kurikuler, dan instruksional umum dan khusus. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pokok persoalannya bukan terletak pada ketiadaan tujuan, melainkan tidak tertulisnya tujuan dengan jelas. Menurutnya, seandainya pesantren tidak memiliki tujuan, tentu aktivitas di lembaga pendidikan Islam yang menimbulkan penilaian kontroversial ini tidak mempunyai bentuk yang konkret, tentu hal ini akan berimplikasi kepada kehilangan orientasi sehingga pesantren berjalan tanpa arah dan dapat menimbulkan kekacauan (*chaos*)¹⁰.

⁸ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren* (Jakarta: Ciputat Press, 2002) hal. 72-74

⁹ Ibid

¹⁰ Mujamil Qomar, *Pesantren; Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi*, hal. 3

Sedangkan dalam konteks eksternal, pesantren dihadapkan kepada era globalisasi yang bersifat *unestablished*. Mastuhu dalam publikasinya “Sistem Pendidikan Pondok Pesantren dalam Era Globalisasi” mendeskripsikan bahwa hukum dinamika kehidupan dalam arus globalisasi bergerak sebagai berikut; perubahan akan terus naik untuk mencapai titik kompleksitasnya, selanjutnya ia cenderung menuju sederhana. Kemudian ketika mencapai titik puncak kesederhanaan, cenderung menjadi stabil dan rutin, yang dalam perjalanan selanjutnya cenderung membongkar kembali kesederhanaan yang telah *established* dan rutin tersebut.¹¹

Tidak dipungkiri, konsekuensi dari adanya arus modernisasi tersebut, “memaksa” pesantren untuk berada pada dua pilihan yang bersifat paradoksal; di satu sisi pesantren dituntut untuk melakukan Langkah-langkah inovatif dan perubahan secara gradual, namun di sisi lainnya, pesantren tidak sanggup dan “belum siap” dalam menyelesaikan problematika internal yang bersifat kompleks. Pada titik ini, dihipotesiskan bahwa pengaruh era globalisasi menjadikan pesantren berada pada titik “kejumudan” dan stagnansi. Di sisi lain, pesantren berlomba-lomba untuk menghadapi globalisasi secara totalitas, namun di titik yang berbeda, justru pesantren “dihancurkan” oleh globalisasi itu sendiri.

Untuk membaca permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh pesantren saat ini, Wahid mengajukan

¹¹ Mastuhu, *Sistem Pendidikan Pondok Pesantren dalam Era Globalisasi*, Jurnal Reflektika, II (2003), 23.

argumentasinya secara jelas. Dalam tulisannya, ia mencoba untuk menjelaskan bahwa problematika dan tantangan yang dihadapi oleh pesantren saat ini berputar di lima persoalan; *Pertama*, mutu pondok pesantren; *Kedua*, problem pendidikan akhlak dari lulusan lembaga pendidikan di Indonesia termasuk pesantren; *Ketiga*, masalah pemikiran keagamaan; *Keempat*, problem keilmuan, dan; *Kelima*, persoalan politik. Adapun tantangannya adalah: pesantren diharapkan mampu meyakinkan pemerintah untuk mengakhiri sikap diskriminatif terhadap pendidikan swasta secara umum; selanjutnya, pesantren diharapkan dapat melakukan transformasi sikap kemandirian pesantren sebagai usaha untuk menjawab tantangan zaman pada masa depan; begitu juga pesantren diharapkan dapat memiliki peran yang sesuai dengan tugasnya selama ini di dalam kehidupan bangsa Indonesia, serta dapat memecahkan masalah-masalah organisasi secara umum.¹²

Kekhawatiran dari para sarjana di atas menunjukkan lemahnya orientasi dan tujuan pendidikan pesantren. Beberapa faktor yang disinyalir menjadi penyebab hal tersebut adalah: otoritas Kiai yang sangat dominan di pesantren. Kemudian, pesantren hanya mengarahkan tujuan kelembagaannya dan kepesantrenannya kepada orientasi keislaman semata. Untuk itu, pemahaman tentang Islam dan ajarannya tersebut harus direkonstruksi sehingga dalam pelaksanaan proses pendidikannya

¹² Penjelasan secara komprehensif tentang kelemahan dan tantangan pesantren, bisa dilihat di Salahuddin Wahid, *Transformasi Pesantren Tebuireng* (Malang, UIN Maliki Press, 2013), hal. 83-114

tidak hanya berdasarkan kepada internalisasi nilai-nilai dasar keislaman melalui pandangan yang sangat sederhana, namun juga mengimplementasikannya secara komprehensif dalam setiap aspek kehidupan. Dengan kata lain, selain dituntut untuk memahami nilai-nilai dasar keislaman, pesantren juga dituntut untuk memahami nilai-nilai dasar budaya bangsa, pendidikan, serta pengorbanan dan perjuangan yang merupakan representasi dari nilai-nilai dan spirit keislaman itu sendiri.

Dengan demikian, dari hasil eksplorasi singkat dari bab awal penelitian ini, maka artikel ini mencoba untuk mendeskripsikan orientasi kepemimpinan yang dilakukan oleh kiai di pesantren, bagaimana orientasi pendidikan pesantren yang ditetapkan dan dijalankan, serta respon kiai terhadap arus globalisasi dan bagaimana bentuk idealisasi orientasi pendidikan pesantren.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Data penelitian ini merujuk kepada sumber-sumber yang memiliki relevansi dengan subjek penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data penelitian ini melalui teknik dokumentasi, karena sumber data yang diinginkan merupakan sesuatu yang tertulis. Peneliti mencari data yang berhubungan dengan objek penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.¹³ Sedangkan Teknik analisis data

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Akomodasi penggunaan analisis isi dalam penelitian ini, dikarenakan peneliti memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menyimpulkan yang benar dan tepat dari sebuah buku atau dokumen.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Orientasi Kepemimpinan Kiai

Al-Attas mengidentifikasi tiga permasalahan kompleks dalam lembaga pendidikan Islam. (1) kebingungan dan kesalahan arah pengetahuan, sehingga; (2) menyebabkan hilangnya adab dalam masyarakat, selanjutnya; (3) munculnya pemimpin yang tidak memiliki syarat dalam memimpin komunitas muslim.¹⁵ Pada titik ini, poin terakhir dari perspektif Al-Attas tersebut menjadi tolak ukur utama yang harus diperhatikan oleh pesantren, secara khusus dalam menentukan metodologi kaderisasi yang tepat untuk menempatkan pemimpin dalam lembaganya. Itu berarti, prinsip *the right man in the right place* betul-betul harus menjadi pondasi utama serta sebagai jaminan bagi perkembangan dan keberlangsungan pendidikan ideal di pesantren.

Hafidh dalam publikasinya menegaskan bahwa yang harus dilakukan oleh Kiai saat ini adalah melakukan penyebaran otoritas pimpinan pesantren dalam setiap bagian, mengimplementasikan

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 220

¹⁵ Syeh Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam* (Kuala Lumpur, Perpustakaan Negara Malaysia, 1999), 33-34

open management, melakukan perubahan cara pengambilan keputusan, dari emosional-subjektif ke rasional-ilmiah serta dari sekedar partisipasi individual menuju pengambilan keputusan yang bersifat demokratis. Selanjutnya, Kiai diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, keterbukaan dan bersikap akomodatif dalam merespon isu-isu strategis dan perubahan pondok pesantren sehingga berimplikasi kepada peningkatan kualitas lembaga pendidikan yang diasuhnya, baik orientasi, metodologi ataupun sinergitas pesantren dan sekolah.¹⁶

Berkaca kepada publikasi Hafidh di atas, ditemukan bahwa saat ini, kepemimpinan pesantren belum mencapai titik ideal. Hal tersebut mengindikasikan belum adanya manajemen terbuka dalam pengelolaan pesantren. Subjektifitas kiai dirasakan masih cukup kuat sehingga segala kebijakan yang diputuskan cenderung berdasarkan kepada ijtihad kiai secara individu daripada atas dasar keputusan kolektif-kolegial. Atas dasar hal tersebut, kiai diharapkan dapat mengarahkan orientasi kepemimpinannya kepada tiga hal: (1) menghasilkan produk pemikiran, (2) berorientasi kepada penciptaan hubungan, dan (3) orientasi pembentukan kerja kultural.

Hal pertama yang dapat dilakukan adalah: kiai mampu melahirkan produk pemikiran. Hal ini berfungsi untuk meneguhkan posisi Kiai sebagai *al-mufakkir al-'alim* di lembaga pendidikannya.

¹⁶ Zaini Hafidh, *Peran Kepemimpinan Kiai dalam Peningkatan Kualitas Pondok Pesantren di Kabupaten Ciamis*, Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol. XXIV, No. 2, 2017, 6

Tentu produk pemikiran yang dihasilkan tetap berlandaskan kepada nilai dan identitas serta prinsip institusional kelembagaan (*al-mabadi' al-ma'hadiyah*). Dalam konteks globalisasi ini, hasil ijtihad pemikiran Kiai tersebut dapat menjadi cerminan, bagaimana posisi lembaga yang diasuhnya, apa saja aspek-aspek prinsipil yang perlu dipertahankan atau apa saja aspek-aspek yang perlu dikembangkan dengan tanpa mencabut akar tradisi kepesantrenan yang telah mengakar kuat di dalamnya.

Selanjutnya, kepemimpinan Kiai di pondok pesantren harus berlandaskan kepada nilai-nilai dan konsep *mu'amalah*. *Pertama, al-'Alaqah al-Ilahiyah*, pemimpin diharapkan dapat menjaga hubungan vertikal dengan Allah SWT, selalu ingat dan sadar esensi kehambaan yang sedang diembannya melalui *idhar al-'ubudiyah*, serta tawakkal, dengan cara bergantung dan berserah diri kepada Allah SWT. *Kedua, al-'Alaqah al-Islamiyah*, memegang teguh prinsip dan nilai keislaman, baik yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits, dan sumber lainnya serta menjadikan Rasul, Nabi dan *al-Ulama' as-Shalih* sebagai panutan dan *role model* dalam kepemimpinannya; *Ketiga, al-'Alaqah an-Nafsiyah*, kemampuan pemimpin dalam menguasai dan mengendalikan diri sendiri sebelum menguasai dan mengendalikan orang lain, melalui, introspeksi diri (*muhasabah*), memosisikan diri sebagai penuntut ilmu (*tholibu al-'ilmi*) yang selalu belajar, dan; *Keempat, al-'Alaqah al-Insaniyah*, mampu menjadikan orientasi kepemimpinannya untuk memuliakan agama Islam dan orang muslim (*li 'izzi al-islam wa al-muslimin*) serta

dapat menjadikan gaya kepemimpinannya sebagai inspirasi bagi manusia lainnya.

Untuk memperkuat dua orientasi kepemimpinan di atas, kiai diharapkan dapat mengarahkan orientasi kepemimpinannya untuk meningkatkan kualitas kerja. Nata menyatakan bahwa syarat ideal pemimpin di lembaga pendidikan adalah seorang figur yang amanah dan pekerja keras, memiliki kemampuan leadership dan manajerial yang kuat, memiliki jaringan yang luas, memiliki integritas, memiliki komitmen pribadi yang kuat, serta diakui kredibilitas intelektualnya.¹⁷

Pertama, Amanah dan pekerja keras. Hal ini sesuai dengan syarat-syarat kepemimpinan yang terkandung dalam al-Qur'an yaitu; amanah; *'adil, Syura; amr bi al-ma'ruf* dan *nahy 'an al-munkar*.¹⁸ Maka dari itu, Kiai di pesantren senantiasa dituntut untuk Amanah dan memiliki tanggung jawab. Jauhari menegaskan bahwa pada hakikatnya, pemimpin di pesantren berfungsi sebagai "*Pengemban Amanah*" yang memiliki tanggung jawab, langsung ataupun tidak langsung, kepada Allah SWT dan rasul-Nya, seluruh personel organisasi yang mempercayainya; baik atasan, rekanan maupun bawahan; para simpatisan organisasi, serta kepada dirinya sendiri dan keluarganya.¹⁹

¹⁷ Abuddin Nata, *Pesantren: Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009) hal. 208

¹⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, *Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*, *Akademika*, Vol. 19, No. 1, 2014, 55

¹⁹ Muhammad Idris Jauhari, *GABKO*, hal. 13

Kedua, Memiliki kemampuan leadership dan manajerial. Hal ini dibutuhkan agar Kiai dapat mengarahkan, membimbing dan meningkatkan performa para guru dan pengembangan kualitas santri. Di samping itu, kemampuan manajerial berfungsi sebagai unsur penegas keterampilan seorang Kiai dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi bagi pendidikan dan pembelajaran. *Ketiga*, Memiliki jaringan yang luas. Pada titik ini, Kiai diharapkan dapat melakukan diplomasi dan membangun hubungan dengan pihak eksternal dalam rangka pengembangan lembaga pendidikannya melalui kerja sama, studi komparatif dan lainnya.

Keempat, memiliki integritas, dengan indikator sebagai berikut; Setia, yang dimaksud kesetiaan di sini adalah bahwa pemimpin diharapkan memegang teguh dan menjaga hubungannya dengan Allah; selanjutnya, terikat pada tujuan, pemimpin mampu menjadikan orientasi kepemimpinannya tidak untuk kepentingan organisasi saja, namun juga untuk kepentingan agama islam. Untuk itu, Kiai diharapkan untuk selalu menjunjung tinggi syariat dan akhlak, hal ini berdasarkan kepada perilaku pemimpin yang tetap berada dan tidak melanggar koridor syariat serta selalu tunduk dan patuh kepada adab dan nilai Islam; amanah, tidak sombong, Disiplin, istiqamah dan konsekuen, dengan menjadi pemimpin yang

memiliki integritas, baik dalam perkataan, perbuatan serta memegang teguh terhadap janji.²⁰

Kelima, Memiliki komitmen pribadi yang kuat. Nidawati menegaskan bahwa kepemimpinan harus berlandaskan kepada tuntutan pendidikan agama Islam dan prinsip-prinsip yang termaktub dalam al-Qur'an serta keteladanan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallama*.²¹ Itu artinya, salah satu indikator komitmen pribadi yang dimiliki Kiai adalah tetap menjadikan orientasi kepemimpinannya berlandaskan kepada nilai *Islami* serta tidak hanya memfokuskan kepada konsep duniawi saja, namun juga berorientasi kepada pencapaian ukhrawi, serta memiliki komitmen dan menyadari bahwa tugas kepemimpinan bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota, namun juga di hadapan Allah SWT.²²

Keenam, Diakui kredibilitas intelektualnya. Untuk memperkuat poin ini, Jabnoun dalam bukunya "*Islam and Management*" menjelaskan bahwa kualitas seorang pemimpin dapat dilihat ketika pemimpin memiliki pengetahuan yang

²⁰ Veitzhal Rivai, Arvian Arifin, *Islamic Leadership; Membangun Superleadership Melalui Kecerdasan Spiritual* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013) 136-138

²¹ Nidawati, *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*, Pionir: Jurnal Pendidikan, Vol. 7, No. 2, 2018, 1

²² Faiqatul Husna, *Kepemimpinan Islam dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam*, Misykat, Vol. 2 No. 2, 2017, 1

mumpuni, kesabaran, ketetapan hati, kefasihan, kemurahan hati, kerja keras, partisipasi dan keberanian.²³

Orientasi Pendidikan Pesantren

Pemerintah selaku pemegang kendali pendidikan di Indonesia menegaskan bahwa orientasi pesantren sebagai sub-pendidikan nasional adalah mencetak para ahli dan ilmuwan dalam bidang keagamaan. Hal tersebut tertuang pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan pendidikan keagamaan, pasal 30 ayat (1) yang menerangkan bahwa:

“Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama”²⁴

Selanjutnya, Departemen Agama RI, selaku pemegang kebijakan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan²⁵, menuangkannya dalam pasal 1 ayat (2), yaitu:

“Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peranan yang menuntut penguasaan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli agama dan menjalankan ajaran agamanya”²⁶

²³ Naceur Jabnoun, *Islam and Management* (Saudi Arabia: International Islamic Publishing House, 2008) 200

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Nomor 20 Tahun 2003 (Bandung: Fokusmedia, 2003) hal. 43

²⁵ Pendidikan yang dimaksud di atas, adalah pondok pesantren sebagaimana yang diatur dalam PP. 55 pasal 26 ayat (2) yang menyelenggarakan pendidikan diniyah pada tingkat dasar dan menengah.

²⁶ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan*, hal. 234

Untuk itu, pesantren selalu dituntut untuk dapat menerjemahkan kebijakan dan cita-cita nasional tersebut. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah menetapkan tujuan kelembagaan dan kepesantrenan, mengingat tujuan merupakan salah satu bagian inti pendidikan serta merupakan kunci keberhasilan lembaga pendidikan, di samping faktor-faktor lainnya yang terkait, seperti; pendidik, peserta didik, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Namun demikian, keberadaan empat faktor ini tidak ada artinya bila tidak diarahkan oleh suatu tujuan. Tujuan menempati posisi yang sangat penting dalam proses pendidikan, sehingga materi, metode, dan alat pengajaran selalu disesuaikan dengan tujuan. Ketidakjelasan tujuan akan mengaburkan aspek tersebut²⁷.

Orientasi pendidikan pesantren, pada dasarnya memang diarahkan sesuai dengan nilai-nilai dasar keislaman. Qomar berpendapat bahwa tujuan pesantren adalah membentuk kepribadian muslim yang menguasai ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya, sehingga bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan negara. Sedangkan menurut Jauhari, sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren mengemban dua misi, yaitu: mendidik dan mempersiapkan sumber daya manusia muslim yang

²⁷ Mujamil Qomar, *Pesantren; Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2005) hal. 3

berkualitas, serta mendidik dan mempersiapkan kader-kader *ulama'* dan *du'at mundzirul qoum*.²⁸

Arifin menyebutkan bahwa tujuan keislaman di dalam pendidikan pesantren terbagi menjadi dua, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk membimbing anak didik agar menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmunya menjadi *muballigh* dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya. Sedangkan tujuan khususnya adalah: mempersiapkan santri untuk menjadi orang yang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh Kiai yang bersangkutan dan mengamalkan (ilmu agama) dalam masyarakat.²⁹

Islamic oriented, sebagaimana disebutkan di atas, bukan satu-satunya tujuan yang ditetapkan oleh pesantren. Hal ini disebabkan, sebagai bagian dari lembaga pendidikan nasional, pesantren dituntut tidak hanya untuk memegang teguh prinsip-prinsip keislaman, namun di sisi lain, ia diharapkan dapat memegang teguh prinsip kenegaraan, dan kemasyarakatan. Jauhari menegaskan bahwa pondok pesantren harus memiliki nilai-nilai dasar yang dijadikan sebagai landasan, sumber acuan, dan bingkai segala kegiatan yang dilakukannya. Nilai-nilai tersebut adalah: nilai-nilai

²⁸ Muhammad Idris Jauhari, *Hakekat Pesantren & Kunci Sukses Belajar Di Dalamnya*, hal. 12

²⁹ H. M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Cet. 3, hlm. 148

dasar agama Islam, nilai-nilai budaya bangsa, nilai-nilai pendidikan, serta nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan.³⁰

Di sisi lain, Wahid menegaskan bahwa secara umum, pesantren memiliki tujuan atau tiga orientasi; *islamic oriented*, *social oriented*, dan *scientific oriented*. Adapun secara khusus, orientasi pesantren pada pembinaan moral dan kehidupan ukhrawi³¹.

Pertama, orientasi keislaman, Ada gambaran unik tentang pesantren yang dikemukakan peneliti dari Belanda, Martin van Bruinessen, ia menjelaskan bahwasanya tradisi pesantren menyimpan dimensi yang paradoksal. Satu sisi ia disinyalir sebagai lembaga khas Indonesia. Namun pada sisi lain, justru pesantren itu sendiri berorientasi internasional dengan Makkah sebagai pusat orientasinya³². Hal ini merujuk kepada penggunaan kitab klasik yang digunakan pesantren yang jelas-jelas bukan berasal dari Indonesia.

Jika kita melihat kepada realita sejarah pendirian pesantren, maka pandangan Martin van Bruinessen tersebut mengandung sebuah kebenaran, mengingat ulama' dan para kiai sebagai *founding father* pesantren itu sendiri, mayoritas lahir dari rahim dan pusran peradaban negara Arab. Akan tetapi, pola pendidikan tradisional yang diadaptasi menegaskan bahwa pesantren

³⁰ Muhammad Idris Jauhari, *Hakekat Pesantren & Kunci Sukses Belajar Di Dalamnya*, hal. 2-4

³¹ Salahuddin Wahid, *Transformasi Pesantren Tebuireng*, hal. 83

³² Zainal Arifin Thoha, *Runtuhnya Singgasana Kiai*, (Yogyakarta: KUTUB, 2003) hal. 22

merupakan lembaga pendidikan yang bercirikan Indonesia. Penegasan terhadap hal tersebut, terlihat dari pola pendidikan tradisional yang dikembangkan pesantren meliputi beberapa aspek kehidupan, di antaranya: pemberian pengajaran dengan struktur, metode, dan literatur tradisional. Pemeliharaan nilai-nilai tertentu yang menekankan pada fungsi pengutamaan beribadah sebagai bentuk pengabdian dan memuliakan guru sebagai jalan untuk memperoleh ilmu agama yang hakiki.³³

Dari sini, kita dapat melihat bahwa orientasi keislaman yang ditetapkan oleh pesantren berlandaskan kepada pusat lahirnya agama Islam itu sendiri, yaitu Makkah al-Mukarramah. Atau mungkin, visi keislaman yang ditetapkan oleh Kiai di pesantren, sejalan dengan pemahamannya tentang nilai-nilai keislaman dan penguasaannya terhadap materi-materi keislaman. Thoha menegaskan, walaupun pesantren didirikan lantaran tuntutan kebutuhan zaman sebagaimana *sunnatullah* serta keniscayaan sejarah (*historical necessity*), namun demikian, pesantren senantiasa dituntut mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tanpa harus tercerabut dari akar tradisi dari khazanah keagamaannya.³⁴

Kedua, orientasi kemasyarakatan, pada hakikatnya, pesantren adalah sebuah lembaga yang mengedepankan prinsip-prinsip keagamaan yang bisa menjadi sebuah solusi terhadap problematika yang ada di masyarakat. Pesantren pada saat ini juga diharapkan

³³ *Ibid*, hal. 21-22

³⁴ Zainal Arifin Thoha, *Runtuhnya Singgasana Kiai*, hal. 35

menjadi pelopor pembaharuan (*agent of change*). Dalam arti, keberadaannya diharapkan mampu memberikan alternatif pemikiran dan tindakan³⁵. Masyarakat adalah bagian dari pesantren, begitu juga sebaliknya. Pesantren diharapkan hadir sebagai lembaga yang menaungi dan menjawab segala problematika yang ada di masyarakat. Karena secara historis, pesantren memiliki karakter sebagai bagian dan atas dukungan masyarakatnya sendiri. Selanjutnya bahwa dalam penyelenggaraan pendidikannya menerapkan kesetaraan santrinya, tidak membedakan status dan tingkat kekayaan orang tuanya. Terakhir, pesantren mengemban misi untuk “menghilangkan kebodohan” khususnya menjadikan masyarakat *tafaqquh fiddien* dan *mundzirul qaum*.³⁶

Hal tersebut di atas menjadi dasar atas didirikannya lembaga pendidikan yang pada hakikatnya berorientasi kepada panggilan kepada manusia untuk menjadi sebuah “subyek” yang selalu sadar dengan kemampuannya, dan berpegang teguh pada nilai-nilai etika dan moralitas universal yang bersumber dari mata air *Kitabullah* dan *Sunnah Rasulullah*³⁷.

Lebih lanjut, Thoha menegaskan bahwa selain terlibat dalam urusan politik dan pemerintahan, pesantren telah terlibat aktif dalam pendidikan dan pengembangan kurikulum. Pesantren juga menjadi pendidikan alternatif di tengah konflik, perubahan, dan

³⁵ *Ibid*, hal. 36

³⁶ Depag RI, *Pola Pembelajaran di Pesantren*, hal. 7

³⁷ Zainal Arifin Thoha, *Runtuhnya Singgasana Kiai*, hal. 36

dekadensi moral di era modern. Di sisi lain, pesantren juga memberikan kontribusi secara signifikan, terutama dalam pemberdayaan dan transformasi sosial kemasyarakatan. Terbukti, pesantren tidak hanya berperan secara aktif membangkitkan sektor ekonomi pertanian, peternakan, dan perikanan, melainkan juga memelopori home-industri serta kerajinan di pedesaan. Di samping itu, dalam konteks perannya sebagai agen sosial, pesantren juga mendidik masyarakat untuk “melek politik” sehingga menjadikan posisi rakyat menjadi berdaya di hadapan negara³⁸.

Bukti konkret kontribusi pesantren terhadap masyarakat, termaktub dalam penelitian yang diajukan Kholid. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa salah satu strategi yang dilakukan oleh pesantren Kaafiz Zaman adalah melakukan *recruitment* generasi muda dari kalangan anak-anak buruh untuk diajarkan ngaji di TPQ pesantren. Selanjutnya, merekrut generasi dewasa dari bapak dan ibu untuk cinta belajar agama Islam melalui sosialisasi jama’ah yasin-tahlil dan momen PHBI.³⁹

Ketiga, orientasi keilmuan. Tujuan pesantren adalah mencetak ulama’ yang mengamalkan ilmunya serta menyebarkan dan mengajarkan ilmu-ilmunya itu kepada orang lain⁴⁰.

³⁸ Zainal Arifin Thoha, *Runtuhnya Singgasana Kiai*, hal. 42

³⁹ Ihyaul Kholid, *Orientasi Pendidikan Pesantren kepada Masyarakat Buruh Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Keislaman, Vol. 4, No. 2, 18-19

⁴⁰ Depag RI, *Pola Pembelajaran di Pesantren*, hal. 20

Respon Kiai terhadap Globalisasi

Dalam tradisi kepesantrenan, kiai diibaratkan sebagai raja kecil yang memiliki otoritas tunggal, sebagai pengendali dalam berbagai aspek kehidupan serta penentu arah kebijakan pesantren. Tidak mengherankan kemudian, apabila pelbagai macam regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah untuk pesantren sampai dinamika perubahan zaman yang pada dasarnya harus direspon oleh pesantren secara cepat dan tepat, menghasilkan pelbagai macam sikap dan respon dari kiai.

Namun demikian, karakteristik Kiai dalam menyikapi arus globalisasi ini, dikelompokkan dalam dua bagian; *Pertama*, pesantren yang kurang adaptif dan akomodatif terhadap perkembangan zaman. Kiai dengan karakteristik seperti ini, memiliki kecenderungan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional dan mengutamakan asas-asas prinsipil yang telah menjadi ciri khas mereka. Penolakan Kiai terhadap arus globalisasi cenderung sangat kuat. Anwar menegaskan bahwa pesantren dengan karakteristik seperti ini, secara total menutup dari modernisasi maupun globalisasi, baik pola pikir, sistem pendidikan melalui penjagaan terhadap otentisitas tradisi dan nilai pesantren secara ketat, baik dalam bentuk simbol ataupun substansi.⁴¹

Kedua, Kiai yang adaptif dan akomodatif terhadap perkembangan zaman. Adapun pesantren dengan karakteristik seperti ini, meyakini bahwa perkembangan dan perubahan zaman

⁴¹ Kasful Anwar US, *Kepemimpinan Kiai Pesantren: Studi terhadap Pondok Pesantren di Kota Jambi*, Kontekstualita, Vol. 25, No. 2, 2020, 9

dapat melahirkan sebuah inovasi dan dapat memberikan dampak yang menggembirakan, seperti inovasi dalam pembelajaran.

Dua sisi mata uang tersebut, tampaknya berdasarkan kepada persepsi Kiai terhadap makna globalisasi itu sendiri. Pada titik ini, respon masyarakat terhadap terbagi menjadi dua bagian: *Pertama*, masyarakat pro globalisasi yang menganggap bahwa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat dunia.⁴² Walaupun pada kenyataannya, mereka tetap melancarkan kritik terhadap esensi globalisasi itu sendiri. *Kedua*, masyarakat Antiglobalisasi yang oleh sebagian orang dianggap sebagai gerakan sosial untuk melakukan perlawanan terhadap ekonomi dan sistem perdagangan global, yang menurut mereka mengikis lingkungan hidup, kedaulatan negara, dunia ketiga, dan penyebab lainnya.⁴³

Dua respon Kiai di atas, menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Soebahar dalam publikasinya menyayangkan sikap “jumud” kiai tersebut, karena usaha untuk mengenali dengan baik aset lembaganya kemudian mengembangkannya secara modern tidak akan pernah tercapai karena cara ini memerlukan kreativitas yang tinggi dari Kiai.⁴⁴ Pemikiran Soebahar di atas, tampaknya berlandaskan kepada latar belakang Kiai, bukan sebagai agen

⁴² Sri Andri Astuti, *Pesantren dan Globalisasi*, Tarbawiyah, Vol. 11, No. 1, 2014, 11

⁴³ Sri Andri Astuti, *Pesantren dan Globalisasi*, Tarbawiyah, Vol. 11, No. 1, 2014, 12

⁴⁴ Abd. Halim Soebahar, *Modernisasi Pesantren; Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2013) 6-7

perubahan. Pada titik ini, selayaknya bagi kiai untuk melakukan introspeksi diri, mengingat saat ini, Kiai tidak menjadi satu-satunya institusi, dimana masyarakat bertanya atau mengadukan pelbagai problematika kehidupan mereka.⁴⁵

Dengan demikian, sikap adaptif dan akomodatif pada dasarnya harus dilakukan, karena pesantren sebagai lembaga pendidikan harus menganut falsafah, "*al-muhaafadlatu 'ala al-qadiim as-shaalih wa al-akhdzu bi al-jadiid al-ashlah*". Yaitu, mempertahankan nilai-nilai lama (tradisional) yang masih relevan serta mengadopsi dan mengakomodasi nilai-nilai baru (*modern*) yang baik dan bisa diterapkan di dalamnya.

Idealisasi Orientasi Pendidikan Pesantren di Era Globalisasi

Menurut Muthohar, pada tataran ideal, tujuan pesantren tidak hanya diarahkan untuk menciptakan manusia yang cerdas secara intelektual. Tetapi juga menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, berestetika dan beretika serta mengikuti perkembangan masyarakat dan budaya. Di samping itu, ia menegaskan bahwa pesantren dituntut juga untuk menghasilkan manusia berpengetahuan dan berketerampilan agar menjadi manusia paripurna dan berguna, atau sering disebut juga cerdas secara moral dan spiritual.⁴⁶

Pemerintah, dalam hal ini kementerian agama menegaskan bahwa pesantren harus adaptif dan responsif terhadap perubahan.

⁴⁵ Edi Susanto, *Krisis Kepemimpinan Kiai; Studi atas Karisma Kiai dalam Masyarakat*, Islamica, Vol. 1, No. 2, 2007, 9

⁴⁶ Ahmad Muthohar, AR, *Ideologi Pendidikan Pesantren* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2007), 94

Perubahan tersebut bukan hanya perubahan dari segi kuantitas saja, yang dibuktikan dengan bertambahnya santri yang selalu meningkat. Akan tetapi juga perkembangan dari aspek kualitatif berupa kualitas orientasi pendidikan.⁴⁷ Mengacu kepada paradigma di atas, setidaknya dua hal yang perlu ditingkatkan oleh pesantren dalam konteks globalisasi ini, yaitu peningkatan orientasi kelembagaan melalui peningkatan kualitas dan mutu pendidikan dan pembelajaran serta peningkatan kompetensi masyarakat pesantren dan kualitas lulusan.

Pertama, peningkatan orientasi kelembagaan melalui peningkatan kualitas dan mutu pendidikan dan pembelajaran. Dalam konteks pembelajarannya, pesantren dituntut untuk melakukan reorientasi kurikulum. Nurcholish Madjid berpendapat bahwa yang harus dilakukan oleh pesantren terhadap kurikulumnya menyangkut dua hal; materi keagamaan dan pemberian porsi terhadap ilmu pengetahuan umum. Ia berpendapat bahwa dalam aspek kurikulum terlihat bahwa pelajaran agama masih dominan di lingkungan pesantren, bahkan materinya hanya khusus yang disajikan dalam berbahasa Arab. Mata pelajarannya meliputi *fiqh* (paling utama), *'aqaid*, *nahwu*, *sharf* (juga mendapatkan kedudukan penting), dan lain-lain. Sedangkan tasawuf dan semangat serta rasa agama (*religiusitas*)

⁴⁷ Dikutip, Apud, *Pergeseran Orientasi Pendidikan Pesantren Khalaf*, An-Nidhom, Vol. 1, No. 1, 2016, 4

yang merupakan inti dari kurikulum “keagamaan” cenderung terabaikan⁴⁸.

Nurcholish Madjid membedakan istilah materi pembelajaran agama dan keagamaan. Perkataan agama lebih tertuju pada segi formil dan ilmunya saja, sedangkan perkataan keagamaan lebih mengenai semangat dan rasa agama (religiusitas). Menurutnya, materi keagamaan ini hanya dipelajari sambil lalu saja tidak secara sungguh-sungguh. Di sisi lain, nampaknya pengetahuan umum masih dilaksanakan secara setengah-setengah, sehingga kemampuan santri biasanya sangat terbatas dan kurang mendapatkan pengakuan dari masyarakat umum. Penyempitan orientasi kurikulum tersebut menurutnya selain ada sisi positifnya, tetapi juga mempunyai dampak negatif bagi lembaga pesantren itu sendiri⁴⁹.

Atas dasar inilah, ia memberikan masukan yang konstruktif kepada pesantren; bahwa penerapan kurikulum di pesantren harus adanya *check and balance*. Pertimbangan yang dimaksud baik antara materi hasanah Islam klasik itu sendiri, misalnya penekanan yang sama antara fiqh, ‘aqaid, tafsir, hadits, bahasa arab, dan lain-lain serta pertimbangan antara pengetahuan keislaman dan pengetahuan umum⁵⁰.

⁴⁸ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994) hal. 142

⁴⁹ dalam Yasmadi, *Modernisasi Pesantren; Kritik Nurchalish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, hal. 78-88

⁵⁰ Ibid

Untuk itu, kurikulum yang disajikan harus sesuai dengan karakteristik dan tujuan yang bersifat nominal, potensial, dan operasional agar dapat menjamin kemungkinan-kemungkinan yang akan didapat oleh calon lulusan pesantren, seperti profesionalisasi ilmiah, profesionalisasi teknologis (praktis), kompartemen mata pembelajaran yang melengkapi santri dalam hal kesejahteraan umat dengan jalan menguasai Al-Quran, As-Sunnah, dan ilmu-ilmu kealaman, dan kompartemen mata pelajaran yang memungkinkan pengembangan individu, baik yang meliputi unsur kejiwaan maupun unsur jasmaniah yang meliputi pelajaran Al-Quran, As-Sunnah, matematika, logika, dan ilmu jiwa⁵¹

Kedua, peningkatan kompetensi masyarakat pesantren dan *life skill* lulusan. Berikut langkah-langkah konstruktif yang bisa diambil oleh pesantren dalam menghadapi era globalisasi ini; membentuk sebuah paradigma baru, menumbuhkan pola pikir positif kepada para santri bahwa pada dasarnya mereka bukan hanya sebagai *student's of school* atau *talaamiidzu al-madrasati*, lebih dari itu, mereka adalah *student's of live* atau *talaamiidzu al-hayaati*. Maka dari itu, pesantren diharapkan dapat melakukan peningkatan pembelajaran organisasi, keterampilan kepemimpinan (*skill of leadership*) atau (*al-mahaaraat al-qiyaadiyyah*). Selanjutnya, pesantren dituntut untuk dapat melakukan penanaman nilai-nilai kepesantrenan kepada

⁵¹ Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) hal. 111

masyarakat pesantren melalui pembentukan integritas yang tergambar dalam konsistensi pikiran, sikap, dan tindakan.

Hal di atas tersebut penting untuk dilakukan, mengingat keberadaan pesantren merupakan partner ideal bagi pemerintah dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlakul karimah.⁵² Walaupun pola pendidikan yang diselenggarakan di pesantren cukup beragam, namun demikian, fungsi yang diembannya sama, yakni mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu agama islam sebagai upaya mewujudkan manusia yang *tafaquh fid-dien*⁵³. Oleh karena itu, Pesantren selalu dituntut untuk mengembangkan orientasi kelembagaan melalui penciptaan mutu pendidikan yang diimplementasikan melalui aktualisasi potensi santri yang dilakukan secara maksimal dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Melalui wujud output yang berkualitas, aktif, kreatif dan inovatif tersebut, akan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan iptek saat ini.⁵⁴

Di samping itu, untuk memperkuat eksistensinya sebagai lembaga khas Indonesia, pesantren dapat melakukannya melalui banyak cara, namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pola pendidikan tradisional tersebut dikembangkan dengan menekankan pada nilai-nilai kehidupan, seperti pemberian

⁵² Guntur Cahaya Kesuma, *Refleksi Model Pendidikan Pesantren dan Tantangannya Masa Kini*, Tadris, Vo. 2, No. 1, 2017, 11

⁵³ Depag RI, *Pola Pembelajaran di Pesantren*, hal. 32

⁵⁴ Zainuddin Syarif, *Manajemen Kepemimpinan Kiai dan Kontribusinya terhadap Mutu Pendidikan Pesantren*, Fikrotuna, Vol. 6, No. 2, 2017, 8

pengajaran dengan struktur, metode, dan literatur tradisional serta pemeliharaan nilai-nilai tertentu yang menekankan pada fungsi pengutamaan beribadah sebagai bentuk pengabdian dan memuliakan guru sebagai jalan untuk memperoleh ilmu agama yang hakiki.⁵⁵

Akhirnya, sikap responsif yang diambil oleh pesantren terhadap globalisasi bukanlah dengan cara meninggalkan nilai-nilai tradisional kepesantrenan secara totalitas. Globalisasi memang menawarkan segala kemewahannya dan kemajuan peradabannya. Namun di sisi lain, tidak dipungkiri, globalisasi juga memerlukan individu yang memiliki kompetensi norma dan akhlak untuk mengisi lubang-lubang kering dari nilai-nilai keislaman dan moralitas.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan orientasi kepemimpinan dan pendidikan pesantren merupakan hal *urgent* untuk dilakukan dalam era globalisasi. Pada aspek orientasi kepemimpinan, kiai diharapkan mengarahkan kepemimpinannya untuk menghasilkan produk pemikiran yang bersumber dari kompetensi, kapabilitas, dan pengalaman kiai serta berlandaskan kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip kelembagaan. Di samping itu, kiai dituntut untuk dapat menciptakan hubungan baik dalam konteks vertikal dengan Allah ataupun secara horizontal dengan SDM pesantren (internal), masyarakat ataupun penggunaan lulusan

⁵⁵ *Ibid*

(eksternal). Selain itu, pembentukan kualitas kerja berbasis kerja kultural dan budaya organisasi, merupakan fokus lain yang perlu dipertimbangkan oleh kiai dalam menetapkan orientasi kepemimpinannya. Pada aspek orientasi pendidikannya, pesantren diharapkan dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan pembelajaran melalui pengembangan dan inovasi kurikulum. Selanjutnya, meningkatkan kompetensi masyarakat pesantren dan *life skill* lulusan, tidak hanya mencetak lulusan multi terampil, namun juga mencetak lulusan *mutafaqqih fid-dien, mundzirul qaum* yang memiliki daya guna bagi masyarakat, agama dan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, Syeh Muhammad Naquib, *The Concept of Education in Islam* (Kuala Lumpur, Perpustakaan Negara Malaysia, 1999)
- Arifin, H. M., *Kapita Selekta Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Anwar US, Kasful, *Kepemimpinan Kiai Pesantren: Studi terhadap Pondok Pesantren di Kota Jambi*, Kontekstualita, Vol. 25, No. 2, 2020
- Arif, Mukhrizal, dkk, *Pendidikan Posmodernisme; Telaah Kritis Pemikiran Tokoh Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Astuti, Sri Andri, *Pesantren dan Globalisasi*, Tarbawiyah, Vol. 11, No. 1, 2014
- Apud, *Pergeseran Orientasi Pendidikan Pesantren Khalaf*, An-Nidhom, Vol. 1, No. 1, 2016
- Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Nomor 20 Tahun 2003 (Bandung: Fokusmedia, 2003)
- Djauhari, Mohammad Tidjani, *Membangun Madura* (Jakarta: Taj Publishing, 2008)

- Feisal, Jusuf Amir, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Hafidh, Zaini, *Peran Kepemimpinan Kiai dalam Peningkatan Kualitas Pondok Pesantren di Kabupaten Ciamis*, Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol. XXIV, No. 2, 2017
- Husna, Faiqatul *Kepemimpinan Islam dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam*, Misykat, Vol. 2 No. 2, 2017
- Jabnoun, Naceur, *Islam and Management* (Saudi Arabia: International Islamic Publishing House, 2008)
- Jauhari, Muhammad Idris, *GABKO*
- Jauhari, Muhammad Idris, *Hakekat Pesantren & Kunci Sukses Belajar Di Dalamnya*.
- Kesuma, Guntur Cahaya, *Refleksi Model Pendidikan Pesantren dan Tantangannya Masa Kini*, Tadris, Vo. 2, No. 1, 2017
- Kholid, Ihyaul *Orientasi Pendidikan Pesantren kepada Masyarakat Buruh Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Keislaman, Vol. 4, No. 2
- Mardiyah, *Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi* (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2012)
- Mastuhu, *Sistem Pendidikan Pondok Pesantren dalam Era Globalisasi*, Jurnal Reflektika, II (2003)
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- Muthohar AR, Ahmad, *Ideologi Pendidikan Pesantren* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2007)
- Nata, Abuddin *Pesantren: Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009)
- Nidawati, *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*, Pionir: Jurnal Pendidikan, Vol. 7, No. 2, 2018
- Qomar, Mujamil, *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Emir, 2015)
- Rivai, Veitzhal dan Arviyan Arifin, *Islamic Leadership; Membangun Superleadership Melalui Kecerdasan Spiritual* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013)

- Soebahar, Abd. Halim, *Modernisasi Pesantren; Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2013)
- Susanto, Edi, *Krisis Kepemimpinan Kiai; Studi atas Karisma Kiai dalam Masyarakat*, *Islamica*, Vol. 1, No. 2, 2007
- Depag RI, *Pola Pembelajaran di Pesantren*
- Syarif, Zainuddin, *Manajemen Kepemimpinan Kiai dan Kontribusinya terhadap Mutu Pendidikan Pesantren*, *Fikrotuna*, Vol. 6, No. 2, 2017
- Thoha, Zainal Arifin, *Runtuhnya Singgasana Kiai* (Yogyakarta: KUTUB, 2003)
- Wahid, Salahuddin, *Transformasi Pesantren Tebuireng* (Malang, UIN Maliki Press, 2013),
- Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurchalish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional* (Jakarta: Ciputat Press, 2002)
- Zuhdi, Muhammad Harfin, *Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*, *Akademika*, Vol. 19, No. 1, 2014